

TESIS

**PENGEMBALIAN HARTA TERPIDANA KORUPTOR SETELAH
PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP**



Oleh :

**AGUS SUGIONO
NIM 1321900020**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA
2020**

TESIS
PENGEMBALIAN HARTA TERPIDANA KORUPTOR SETELAH PUTUSAN
PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Diajukan Oleh:

AGUS SUGIONO
NIM : 1321900020

Telah disetujui pembimbing untuk diujikan pada :
Surabaya, 06 Januari 2021

Dr.Otto Yudianto,SH.M.Hum
Pembimbing I



Dr.Erny Herlin Setyiorini,S.H.,M.H
Pembimbing II



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : AGUS SUGIONO
NIM : 1321900020
Program : Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Tesis" yang saya buat dengan judul:

PENGEMBALIAN HARTA TERPIDANA KORUPTOR SETELAH PUTUSAN
PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 6 Januari 2021

Hormat saya,



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, untaian syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat, hidayah, bimbingan dan karunia-Nya, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Penulisan tesis ini tidaklah berjalan dengan mulus. Kesibukan sehari-hari seringkali memecah konsentrasi, sehingga tidak jarang bahan-bahan yang telah terkumpul dibiarkan bertumpuk karena berbagai aktivitas yang menuntut untuk segera diselesaikan. Tetapi, berbekal dengan “keyakinan” dan dukungan dari berbagai pihak, alhamdulillah saya dapat menyelesaikan tesis ini.

Untuk itu, sudah selayaknya saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tulisan ini kepada :

- Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing 1 di dalam penulisan tesis ini, arahan dan bimbingannya
- Ibu Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H, M.H. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, dan juga selaku Pembimbing 2, terima kasih atas arahan dan bimbingan di dalam penulisan tesis ini.
- Seluruh Dosen dan Pengelola Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Bapak Dr.H. Slamet Suhartono, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. di dalam penulisan tesis ini, memberi kesempatan menempuh studi Program Magister Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

- Bapak Prof. Dr. Made Warka, S.H, M.Hum Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. terima kasih atas arahan dan bimbingan di dalam penulisan tesis ini.
- Ibu Dr. Yovita Arie Mangesti Setyorini, S.H, M.H. CLA, dosen S2 terima kasih atas arahan dan bimbingan di dalam penulisan tesis ini.
- Orang tua, istri dan ananda tercinta yang telah memberikan pengorbanan, kasih sayang yang tak ternilai harganya.
- Teman-teman mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga amal baik dan bantuan yang diberikan oleh Ibu/Bapak mendapatkan imbalan dari Allah SWT.

Akhirnya, saya menyadari bahwa *tak ada gading yang tak retak*, untuk itu saya menyambut baik atas segala masukan, saran dan kritikan semua pihak bagi kesempurnaan tulisan ini. Semoga segala daya dan upaya kita senantiasa dalam lindungan dan kasih-Nya. Amin ...

Surabaya, 22 Desember 2020

RINGKASAN

Korupsi sebagai salah satu tindak pidana yang dianggap *extra ordinary crime*, karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan menimbulkan kerugian keuangan negara, maka untuk menanggulangnya diperlukan cara-cara yang luar biasa pula. Bagi Indonesia, korupsi

merupakan suatu ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara karena kerugian yang dialami sangat besar dengan perbuatan para koruptor yang nyaris membuat bangkrut perekonomian negara,

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dibedakan beberapa permasalahan sebagai berikut::

1. Bagaimana Pengembalian Harta Terpidana Koruptor Setelah Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap ?
2. Bagaimana rasio decidendi pemiskinan koruptor dalam rangka pengembalian harta berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi ?

Tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yakni hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang.

Penggunaan penelitian hukum normatif untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai usulan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, meski implementasi Undang Undang dalam hal ini objek penelitiannya adalah tindak pidana korupsi. Selain itu juga penyelesaian masalahnya akan lebih rinci mengetahui dan mengerti serta di samping menganalisis peraturan yang ada juga berhadapan dengan kenyataan dan secara langsung berhubungan dengan terdakwa koruptor.

Hasil penelitian, kenyataan bahwa banyak putusan pengadilan yang memberikan vonis terhadap pelaku tindak pidana korupsi di bawah 5 tahun, yang memudahkan seorang mantan narapidana korupsi untuk melenggang mencalonkan kembali dalam kontestasi pemilihan kepala daerah memunculkan kekhawatiran tersendiri mengingat posisi kepala daerah berhubungan erat dengan kekuasaan dan kewenangan publik, yang dapat berkorelasi dengan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) untuk keuntungan pribadi yang merugikan negara. Pegiat antikorupsi sangat mendukung adanya sanksi pemiskinan terhadap koruptor. , tindakan korupsi yang dilakukan di Indonesia jelas sekali rendahnya rasa keadilan khususnya dalam konteks masih begitu meluasnya kemiskinan dan jurang si kaya dan si miskin, serta rendahnya penegakan hukum dari putusan pengadilan., jika seorang koruptor dimiskinkan sampai ke titik nol pun, masih tetap adil jika dikaitkan dengan konteks sosial dan ekonomi negeri ini.

Kata Kunci : Rendahnya Putusan Pengadilan, Pentingnya Pemiskinan Koruptor

ABSTRACT

Corruption as one of the criminal acts that is considered an extra ordinary crime, because it involves the abuse of power and causes financial losses to the state, so to overcome it requires extraordinary methods as well. For Indonesia, corruption is a threat to the survival of the nation

and the state because of the enormous losses suffered by the actions of corruptors who almost bankrupt the country's economy.

Based on the above background, several problems can be distinguished as follows:

1. How is the return of assets of corrupt convicts after the Court's decision has permanent legal force?

2. What is the ratio of decidency to impoverishment of corruptors in the context of returning assets based on court decisions on corruption?

This thesis uses a type of normative legal research, namely written law that is studied from various aspects such as aspects of theory, philosophy, comparison, structure / composition, consistency, general explanation and explanation of each article, formality and binding strength of a law.

The use of normative legal research to produce new arguments, theories or concepts as a suggestion in solving the problems at hand, even though the implementation of the Law in this case the object of research is the criminal act of corruption. In addition, the resolution of the problem will be more detailed in knowing and understanding as well as analyzing existing regulations as well as dealing with reality and directly dealing with the accused of being corrupt.

The results of the study, the fact that many court decisions provide verdicts against perpetrators of corruption under 5 years, which makes it easier for a former corruption convict to pitch back in the regional head election contest raises its own concerns considering that the position of the regional head is closely related to public power and authority. , which can correlate with the abuse of power (abuse of power) for personal gain that harms the state. Anti-corruption activists strongly support the impoverishment of sanctions against corruptors. , corruption acts committed in Indonesia clearly lack a sense of justice, especially in the context of the still widespread poverty and gap between the rich and the poor, and the low law enforcement of court decisions. Even if a corruptor is impoverished to zero, it is still fair if associated with the social and economic context of this country.

Keywords: Low Court Decisions, The Importance of Impoverishment of Corruptors

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR TIM PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
RINGKASAN	vii
ABSTRACT.....	viii

DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Manfaat Penelitian	14
1.4.1. Manfaat Teoritis	14
1.4.2. Manfaat Praktis	15
1.5. Orisinalitas Penelitian.....	15
1.5.1. Penelitian Terdahulu	15
1.5.2. Hasil Penelitian Terdahulu	17
1.6. Metode Penelitian	19
1.6.1. Jenis Penelitian	19
1.6.2. Pendekatan Masalah	20
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	22
1.6.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	23
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	24
1.7. Pertanggungjawaban Sistematis	25
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP	26
2.1. Landasan Teori.....	26
2.1.1. Teori Kewenangan	26
2.1.2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	32
2.1.3. Teori Perlindungan Hukum.....	37
2.1.4. Teori Tujuan Hukum	44
2.2. Penjelasan Konsep	52
2.2.1. Konsep Putusan Pengadilan Berkekuatan Tetap.....	52
2.2.2. Konsep Kekuatan Eksekutorial Putusan Hakim	58
2.2.3. Konsep Pencabutan Hak-hak Tertentu	66
2.2.4. Konsep Perampasan Barang-barang Tertentu.....	72
Bab III PEMBAHASAN	75
3.1. Pengembalian Harta Terpidana Koruptor Setelah Putusan	

Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap.....	75
3.2. Perspektif Kerugian Negara Tindak Pidana Korupsi.....	79
3.3. Kendala Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Korupsi.....	83
3.4. Rasio Decidendi Pemiskinan Koruptor Dalam Rangka Pengembalian Harta Untuk Negara Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	93
3.5. Perbandingan Indonesia Dengan Malaysia Terhadap Pelaku Korupsi.....	95
3.6. Dasar Rasionalitas Pemiskinan Tersangka Atau Terdakwa Tindak Pidana Korupsi.....	101
3.7. Kontradiksi Antara Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Dengan Vonis Pengadilan Tipikor Yang Ringan/Bebas	111
3.8. Analisis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2018/JKT.PST Yang Memutus Bersalah Terdakwa Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi,	116
BAB IV PENUTUP	133
4.1. Kesimpulan.....	133
4.2. Saran.....	134

DAFTAR BACAAN